

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009). Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu daerah serta mempermudah mobilitas masyarakat. Pentingnya peran transportasi tersebut dapat terlihat dari penyelenggaraannya yang memberikan pengaruh besar kepada semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta meningkatnya kebutuhan jasa transportasi bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri maupun ke mancanegara. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari tentunya masyarakat memerlukan suatu alat angkut/ sarana transportasi seperti kereta, sepeda motor, mobil, angkutan umum/ kendaraan bermotor umum dan lain sebagainya. Angkutan umum dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif masyarakat dalam melakukan pergerakan seperti dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan angkutan perkotaan maupun angkutan pedesaan sedangkan untuk wilayah kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain namun masih dalam satu provinsi menggunakan Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) serta untuk wilayah kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain yang melewati lebih dari satu provinsi menggunakan Angkutan Antarkota Antar Provinsi (AKAP).

Kabupaten Situbondo dilayani oleh angkutan umum salah satunya yaitu angkutan pedesaan (ANGDES) dengan Trayek Situbondo-Besuki (ke arah barat wilayah studi) dan Trayek Situbondo-Banyuputih (ke arah timur wilayah studi) dimana kedua trayek ini merupakan trayek linear. Pada kondisi eksisting, Trayek Situbondo-Besuki dan Situbondo-Banyuputih belum memiliki surat keputusan dalam penyelenggaraan izin angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo. Hal ini menyebabkan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo kesulitan dalam melakukan penertiban terhadap armada yang

beroperasi sehingga dalam pelaksanaannya banyak ditemukan armada yang beroperasi melebihi armada yang diizinkan. Selain kurangnya SK penyelenggaraan izin trayek, Kabupaten Situbondo juga belum memiliki SK tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo sehingga penentuan tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo berdasarkan kesepakatan antara supir (operator). Trayek angkutan pedesaan yang beroperasi saat ini memiliki cakupan pelayanan sebesar 59,48 km² dengan nisbah 3,63%. Hal ini tentunya belum cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat akan angkutan umum karena sebagian besar wilayah di Situbondo belum terlayani angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan pedesaan sebagai sarana dalam mengakomodasi mobilitas masyarakat di suatu kabupaten/kota sangatlah diperlukan, maka pelayanan angkutan pedesaan diharapkan mampu menyediakan pelayanan yang baik, efektif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/ kota(UU Nomor 22 Tahun 2009, pasal 139 ayat 3). Perencanaan angkutan pedesaan harus memperhatikan tata guna lahan serta demand (permintaan) dari pengguna jasa guna terciptanya pelayanan angkutan yang handal. Penyediaan kebutuhan angkutan pedesaan ini dapat dilihat dari besarnya perjalanan yang dihasilkan dari pergerakan orang.

Belum tersedianya sarana angkutan umum menyebabkan sebagian besar perjalanan menuju pusat kegiatan yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan pribadi di Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir yang didominasi oleh sepeda motor dengan persentase sebesar 56%. Berdasarkan data kecelakaan 5 (lima) tahun terakhir dari kepolisian 624 kecelakaan didominasi oleh sepeda motor. Pada kondisi eksisting di kecamatan Banyuglugur, terdapat angkutan pickup yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang oleh masyarakat setempat. Hal ini tentunya dapat membahayakan keselamatan pengguna jasa angkutan serta tidak memenuhi standar PM 15 tahun 2019.

Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Situbondo diharapkan dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas menuju bangkitan maupun tarikan perjalanan di pusat kegiatan, baik pusat perdagangan, pendidikan, perkantoran maupun simpul transportasi lainnya sehingga dapat membuat masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan terkait angkutan umum di Kabupaten Situbondo, maka diperlukan kajian mengenai perencanaan jaringan trayek angkutan umum Kabupaten Situbondo untuk memberikan kemudahan akses dalam melakukan mobilitas masyarakat sehingga pelayanan angkutan umum di Kabupaten Situbondo dapat merata. Hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk menyusun Kertas Kerja Wajib dengan judul **"Perencanaan Ulang Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan di Kabupaten Situbondo."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka didapatkan identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum meratanya pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo dikarenakan Kabupaten Situbondo hanya memiliki 2 trayek angkutan pedesaan yaitu Situbondo-Besuki dan Situbondo-Banyuputih.
2. Belum tersedianya SK tarif yang mengatur penyelenggaraan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo sehingga penentuan tarif angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo masih berdasarkan kesepakatan antara supir (operator).
3. Belum tersedianya surat keputusan dalam penyelenggaraan izin angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo, hal ini tentunya menyebabkan dinas perhubungan Kabupaten Situbondo mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban armada sehingga banyak ditemukan armada yang beroperasi melebihi dari armada yang diizinkan.

4. Mobilitas pergerakan masyarakat Kabupaten Situbondo masih menggunakan kendaraan pribadi dengan proporsi penggunaan kendaraan pribadi sebesar 95%.
5. Pada kondisi eksisting di kecamatan Banyuglugur terdapat angkutan penumpang dan barang dengan mobil pickup, hal ini tentunya membahayakan pengguna jasanya serta tidak sesuai dengan standar PM 15 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
6. Cakupan pelayanan pada kedua trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo sebesar 59,48 km² dengan nisbah 3,63%, sehingga belum cukup untuk melayani mobilitas masyarakat di Kabupaten Situbondo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Berapakah jumlah permintaan terhadap pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana usulan perencanaan jaringan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo?
3. Berapa tarif yang sesuai pada trayek usulan dengan analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)?

1.4 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari dilakukan penelitian ini adalah untuk merencanakan ulang jaringan trayek di Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis jumlah permintaan terhadap pelayanan angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo.
2. Menganalisis usulan perencanaan jaringan trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Situbondo
3. Menganalisis tarif yang sesuai pada trayek usulan berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

1.5 Batasan Masalah

Untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW), maka diperlukan batasan masalah yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Situbondo
2. Batasan analisis penelitian ini hanya mencakup permintaan (demand) angkutan umum di Kabupaten Situbondo, penentuan rute trayek usulan, analisis kinerja angkutan umum pada trayek usulan serta penentuan tarif trayek usulan.
3. Dalam penelitian ini Trayek Situbondo-Besuki dan Situbondo-Banyuputih diabaikan.